



EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENDIDIKAN: BAGAIMANA PERSEPSI MENURUT MAHASISWA

Agung Danur Pratama¹, Nabila Fatmasary², Tiara Novita Sari³, Arya Mangatur Manik⁴, Aisyah Nuraini Asmungi⁵, Joko Tri Nugraha⁶

¹⁻⁶ Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116, Indonesia

Korespondensi penulis: agung.danur.pratama@students.untidar.ac.id¹
jokotrinugraha@untidar.ac.id⁶

Abstract. *The increasing fiscal pressures faced by educational institutions have made the issue of higher education budget efficiency an important topic. Various student perspectives on the implementation of budget efficiency policies at Tidar University prompted this research. How students see the impact of the policy on important things in the academic environment, such as scholarships, learning facilities, scientific productivity, and student organization operations, is the purpose of this study. This study used a descriptive quantitative approach. The closed questionnaire instrument was distributed to students of class 2024 of the State Administration Study Program. The results showed that the majority of students assessed the efficiency policy as bringing more negative impacts, such as a decrease in scholarships and lecturer allowances, a decrease in student activities, and an increased possibility of increased education costs. In contrast, they support transparency and accountability in budget management and efficiency directed at reducing administrative costs. This research confirms that educational efficiency should not be used to reduce budgets but should be done in a way that is fair and benefits students. These results are important for policymakers to consider as they create budget policies that are not only cost-effective but also socially equitable and support sustainable access to higher education.*

Keywords: *Education budget efficiency; Student perceptions; Education public policy*

Abstrak. Meningkatnya tekanan fiskal yang dihadapi institusi pendidikan telah membuat masalah efisiensi anggaran pendidikan tinggi menjadi topik penting. Berbagai perspektif mahasiswa tentang penerapan kebijakan efisiensi anggaran di Universitas Tidar mendorong penelitian ini. Bagaimana siswa melihat dampak kebijakan tersebut terhadap hal-hal penting dalam lingkungan akademik, seperti beasiswa, fasilitas pembelajaran, produktivitas ilmiah, dan operasional organisasi kemahasiswaan, adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Instrumen kuesioner tertutup disebarluaskan kepada mahasiswa angkatan 2024 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas siswa menilai kebijakan efisiensi lebih banyak membawa dampak negatif, seperti penurunan beasiswa dan tunjangan dosen, penurunan aktivitas kemahasiswaan, dan peningkatan kemungkinan biaya pendidikan meningkat. Sebaliknya, mereka mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan efisiensi yang diarahkan pada pengurangan biaya administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa efisiensi pendidikan tidak boleh digunakan untuk mengurangi anggaran tetapi harus dilakukan dengan cara yang adil dan menguntungkan siswa. Hasil ini penting bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan ketika mereka membuat kebijakan anggaran yang tidak hanya hemat biaya tetapi juga berkeadilan sosial dan mendukung akses pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Efisiensi anggaran pendidikan; Persepsi mahasiswa; Kebijakan publik pendidikan

1. Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik untuk menjawab berbagai kebutuhan, kepentingan, dan masalah dalam masyarakat melalui proses yang sistematis dan terencana. Widodo, (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bernegara, dengan melibatkan berbagai aktor dan kepentingan.

Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik mencakup proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pramono, 2020). Sejalan dengan itu, Mansur, (2021) menambahkan bahwa kebijakan publik selalu berorientasi pada pemecahan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas. Pemahaman terhadap konsep kebijakan publik menjadi penting sebagai landasan awal untuk menelaah bagaimana suatu kebijakan dapat berdampak pada sektor pendidikan, khususnya dalam konteks pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.

Efisiensi anggaran dalam konteks kebijakan publik merujuk pada kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Sutmasa, (2021) menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana proses implementasinya mampu meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan hasil. Dalam sektor pendidikan, efisiensi anggaran menjadi indikator penting yang menunjukkan sejauh mana dana pendidikan dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang prioritas dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Menurut Giantara & Amiliya, (2021) kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik harus menjamin keberlangsungan program-program pendidikan dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan tepat guna.

Kualitas implementasi kebijakan anggaran pendidikan menjadi perhatian utama karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan pelayanan pendidikan secara adil dan merata. Maka dari itu, efisiensi anggaran dalam dunia

pendidikan bukan hanya permasalahan teknis fiskal, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga negara.

Kajian literatur dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sejumlah penelitian telah menyoroti pentingnya efisiensi anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja kebijakan publik, khususnya dalam sektor pendidikan. Misalnya, penelitian oleh Desrinelti et al., (2021) menyoroti bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Kebijakan pendidikan adalah rendahnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, yang berdampak pada pencapaian output pendidikan yang tidak optimal. Masalah ketidakefisienan anggaran sering kali muncul akibat kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, lemahnya sistem pengawasan, dan minimnya transparansi dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kajian terhadap persepsi mahasiswa sebagai pihak penerima manfaat langsung dari kebijakan pendidikan menjadi penting untuk mengungkap sejauh mana anggaran tersebut benar-benar dirasakan kebermanfaatannya. Kajian ini menjadi kontribusi ilmiah dalam melengkapi studi-studi terdahulu dengan pendekatan perspektif pengguna kebijakan, yakni mahasiswa. Permasalahan penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar setiap tahunnya, persepsi publik, khususnya mahasiswa, terhadap penggunaan anggaran tersebut masih bervariasi. Variasi persepsi ini mencerminkan realitas di beberapa perguruan tinggi, yang menunjukkan perbedaan dalam implementasi dan pemanfaatan anggaran pendidikan. Di beberapa perguruan tinggi, mahasiswa merasakan dampak positif dari penggunaan anggaran seperti peningkatan fasilitas, beasiswa, dan layanan akademik.

Namun, tidak sedikit pula mahasiswa yang merasa bahwa anggaran belum digunakan secara efisien karena masih ditemukan ketimpangan fasilitas, kualitas layanan yang belum memadai, serta kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka menghasilkan sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang diterapkan di Universitas Tidar. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik tolak dalam menyusun fokus kajian yang berbasis pada persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis persepsi mahasiswa terhadap efisiensi anggaran pendidikan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui instrumen terstruktur. Pendekatan ini relevan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan persepsi secara statistik. Penelitian dilaksanakan di lingkungan mahasiswa tahun 2024, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara yang menerima alokasi anggaran pendidikan secara langsung. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari Maret hingga Mei 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang berada pada jenjang sarjana khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Tidar yang berjumlah 250 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 72 orang secara *purposive*, yaitu mahasiswa yang telah memiliki pemahaman terhadap kebijakan pembiayaan pendidikan di kampusnya. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. Instrumen yang digunakan berupa daftar pertanyaan dengan skala Likert empat poin, yang dirancang untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Pilihan jawaban yang tersedia mencerminkan tingkat persetujuan mulai dari "Sangat Setuju" (4), "Setuju" (3), "Tidak Setuju" (2), hingga "Sangat Tidak Setuju" (1). Pendekatan ini dipilih untuk memudahkan responden dalam menyampaikan pendapat mereka secara jelas dan terukur. Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan statistik sederhana untuk menggambarkan kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dikelola institusi. Penelitian ini merujuk pada teori kebijakan publik dengan indikator implementasi kebijakan dan teori persepsi ekologis terhadap persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi penggunaan dana pendidikan.

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner sesuai dan relevan dengan variabel yang diteliti. Meskipun tidak dijelaskan metode statistiknya secara rinci, pendekatan yang digunakan mengarah pada validitas isi (*content validity*), yang menilai kesesuaian antara pertanyaan dan konstruk teoretis, biasanya melalui telaah ahli atau uji kelayakan item. Sementara itu, mencerminkan tingkat persetujuan mulai dari "Sangat Setuju" (4), "Setuju" (3), "Tidak

Setuju" (2), hingga "Sangat Tidak Setuju" (1). Pendekatan ini dipilih untuk memudahkan responden dalam menyampaikan pendapat mereka secara jelas dan terukur.

Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan statistik sederhana untuk menggambarkan kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang dikelola institusi. Penelitian ini merujuk pada teori kebijakan publik dengan indikator implementasi kebijakan dan teori persepsi ekologis terhadap persepsi mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi penggunaan dana pendidikan. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner sesuai dan relevan dengan variabel yang diteliti. Meskipun tidak dijelaskan metode statistiknya secara rinci, pendekatan yang digunakan mengarah pada validitas isi (*content validity*), yang menilai kesesuaian antara pertanyaan dan konstruk teoretis, biasanya melalui telaah ahli atau uji kelayakan item. Sementara itu, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, yang menunjukkan konsistensi internal antar item dalam instrumen. Hasil dari metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran deskriptif mengenai perspektif mahasiswa terhadap kebijakan efisiensi anggaran dalam pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Tidar.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini melibatkan 72 responden yang berasal dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara, Universitas Tidar. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 31 laki-laki (43,1%) dan 41 perempuan (56,9%). Berdasarkan usia, mayoritas usia responden berusia 19 tahun (44,5%) diikuti oleh 18 tahun (25%), 20 tahun (22,2%), 22 tahun (5,6%), dan 21 tahun (2,8%). Mayoritas responden berpartisipasi aktif dalam mengikuti organisasi di kampus (56,9%) dan 43,1% responden tidak berpartisipasi aktif dalam mengikuti organisasi di kampus. Mahasiswa yang mengikuti organisasi di kampus (41 mahasiswa) dan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi di kampus (31 mahasiswa).

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Jenis Kelamin	Laki Laki	31	43,1	43,1	43,1
	Perempuan	41	56,9	56,9	100
Umur	18	18	25	25	25
	19	32	44,4	44,4	69,4
	20	16	22,2	22,2	91,7
	21	2	2,8	2,8	94,4
	22	4	5,6	5,6	100
Organisasi	Ya	41	56,9	56,9	100
	Tidak	31	43,1	43,1	43,1

Tabel 1 Jenis kelamin, usia, dan partisipasi mahasiswa dalam berorganisasi

Para responden memberikan penilaian terhadap sejumlah pernyataan dalam kuesioner dengan menggunakan skala Likert empat poin. Skala ini terdiri dari empat tingkat persetujuan, yakni: Sangat Setuju (4), Setuju (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1). Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data deskriptif atas jawaban yang diberikan responden terhadap setiap variabel yang diteliti:

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0
Tidak Setuju	3	4.2	4.2	4.2
Setuju	25	34.7	34.7	38.9
Sangat Setuju	44	61.1	61.1	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 2 Efisiensi anggaran pendidikan mengurangi beasiswa dan fasilitas pembelajaran

Berdasarkan hasil survei yang terdapat pada tabel 2. 72 mahasiswa, mayoritas responden menyatakan persetujuan terhadap pernyataan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan beasiswa dan fasilitas pembelajaran. Sebanyak 44 mahasiswa (61,1%) menyatakan *sangat setuju*, dan 25 mahasiswa (34,7%) menyatakan *setuju*. Jika digabungkan, 69 dari 72 mahasiswa (95,8%) menyetujui bahwa efisiensi anggaran berpengaruh terhadap pengurangan dukungan pembelajaran.

Sementara itu, hanya 3 mahasiswa (4,2%) yang *tidak setuju*, dan tidak ada mahasiswa yang *sangat tidak setuju* terhadap pernyataan tersebut. Dari data tabel.2 mayoritas besar mahasiswa merasakan dampak efisiensi anggaran, khususnya terhadap beasiswa dan fasilitas pembelajaran yang mereka terima. Hasil ini didukung oleh Penelitian Ilma & Prabandari, (2025) dan Kurnia et al., (2022) menunjukkan bahwa implementasi efisiensi anggaran yang tidak disertai dengan kompensasi program atau inovasi kebijakan justru berujung pada ketimpangan dan penurunan kualitas pendidikan.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.4	1.4	1.4
Tidak Setuju	9	12.5	12.5	13.9
Setuju	28	38.9	38.9	52.8

Sangat Setuju	34	47.2	47.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 3 Efisiensi anggaran mengancam produktivitas akademik dan inovasi ilmiah

Hasil survei pada tabel 3 yang melibatkan 72 responden menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasakan dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap produktivitas akademik dan inovasi ilmiah. Data menunjukkan bahwa sebanyak 47,2% responden menyatakan *sangat setuju*, dan 38,9% menyatakan *setuju* terhadap pernyataan bahwa efisiensi anggaran mengancam dunia akademik dan penelitian. Dengan demikian, 86,1% responden menyuarakan kekhawatiran yang signifikan mengenai pengurangan anggaran yang berdampak langsung pada kinerja dan produktivitas ilmiah.

Sementara itu, hanya 12,5% responden yang *tidak setuju*, dan 1,4% yang *sangat tidak setuju*, menandakan bahwa hanya sebagian kecil yang menilai efisiensi anggaran tidak membahayakan produktivitas akademik. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan dan penelitian dapat menghambat kolaborasi ilmiah,

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.4	1.4	1.4
Tidak Setuju	7	9.7	9.7	11.1
Setuju	43	59.7	59.7	70.8
Sangat Setuju	21	29.2	29.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 4 Efisiensi anggaran mengganggu operasional organisasi mahasiswa

Hasil survei pada tabel 4. terhadap 72 responden menunjukkan bahwa sebagian besar menyatakan setuju bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak negatif terhadap operasional organisasi mahasiswa. Sebanyak 43 responden (59,7%) menyatakan *setuju*, dan 21 responden (29,2%) menyatakan *sangat setuju*. Dengan demikian, total 88,9% responden menyuarakan kekhawatiran bahwa pengurangan anggaran mengganggu aktivitas organisasi siswa secara signifikan.

Sementara itu, hanya 7 responden (9,7%) yang *tidak setuju* dan 1 responden (1,4%) yang *sangat tidak setuju* terhadap pernyataan tersebut. Hasil ini mencerminkan

persepsi umum bahwa efisiensi anggaran, terutama di lingkungan kampus, telah membatasi ruang gerak organisasi mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan *soft skill*, kepemimpinan, dan partisipasi sosial.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Siswanto & Pratama (2021) yang menyebutkan bahwa pemotongan dana kemahasiswaan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program kerja organisasi mahasiswa, baik dalam bentuk pelatihan, seminar, maupun kegiatan sosial. Penelitian lain oleh Irwansyah (2020) menegaskan bahwa organisasi mahasiswa merupakan elemen penting dalam pembentukan karakter dan kepemimpinan mahasiswa, namun sering kali menjadi korban pertama saat terjadi efisiensi anggaran kampus.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	3	4.2	4.2	4.2
Tidak Setuju	16	22.2	22.2	26.4
Setuju	34	47.2	47.2	73.6
Sangat Setuju	19	26.4	26.4	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 5 Efisiensi anggaran sebaiknya fokus pada pengurangan program administratif

Hasil survei terhadap 72 responden menunjukkan bahwa mayoritas mendukung gagasan bahwa efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada pengurangan program administratif daripada pemotongan pada sektor akademik atau kemahasiswaan. Sebanyak 34 responden (47,2%) menyatakan *setuju*, dan 19 responden (26,4%) *sangat setuju*. Secara keseluruhan, 73,6% responden memberikan dukungan terhadap pandangan ini.

Sementara itu, 16 responden (22,2%) menyatakan *tidak setuju* dan 3 responden (4,2%) *sangat tidak setuju*, menandakan bahwa meskipun terdapat penolakan, proporsinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat persetujuan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat akademik cenderung memandang beban administratif sebagai area yang paling memungkinkan untuk dihemat tanpa mengorbankan kualitas pendidikan dan produktivitas ilmiah.

Temuan ini selaras dengan kajian oleh De Boer et al. (2020), yang menekankan bahwa perluasan birokrasi di perguruan tinggi kerap menjadi beban anggaran tanpa memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas pembelajaran maupun penelitian.

Studi serupa oleh Cummings dan Riviezzo (2021) menunjukkan bahwa efisiensi administratif dapat dicapai melalui digitalisasi layanan dan restrukturisasi manajemen, tanpa harus memangkas program-program esensial.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	2	2.8	2.8	2.8
Tidak Setuju	5	6.9	6.9	9.7
Setuju	34	47.2	47.2	56.9
Sangat Setuju	31	43.1	43.1	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 6 Kebijakan efisiensi memicu protes karena berdampak pada kesejahteraan dosen dan distribusi beasiswa

Data menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai kebijakan efisiensi anggaran berdampak negatif terhadap kesejahteraan dosen dan distribusi beasiswa, sehingga berpotensi memicu protes. Sebanyak 47,2% responden menyatakan *setuju* dan 43,1% *sangat setuju*, total 90,3% menyatakan persetujuan terhadap pernyataan tersebut. Sementara itu, hanya 6,9% yang *tidak setuju* dan 2,8% *sangat tidak setuju*. Temuan ini mengindikasikan keprihatinan yang tinggi di kalangan responden terhadap dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan efisiensi yang tidak berimbang. Hal ini diperkuat oleh studi Sulistyani & Haryanto (2021) yang menemukan bahwa kebijakan efisiensi kerap menekan anggaran kesejahteraan dosen, terutama yang berada pada jenjang non-profesor.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.4	1.4	1.4
Tidak Setuju	3	4.2	4.2	5.6
Setuju	30	41.7	41.7	47.2
Sangat Setuju	38	52.8	52.8	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 7 Mahasiswa menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan

Hasil survei menunjukkan bahwa tuntutan mahasiswa terhadap transparansi anggaran pendidikan sangat tinggi. Sebanyak 52,8% responden menyatakan *sangat setuju* dan 41,7% *setuju* bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran pendidikan perlu ditegakkan. Hanya 4,2% yang *tidak setuju* dan 1,4% *sangat tidak setuju*. Dengan

demikian, lebih dari 94% responden secara jelas mendukung keterbukaan informasi keuangan dalam dunia pendidikan tinggi. Ini mencerminkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap pengelolaan dana publik serta meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari pihak kampus. Temuan ini konsisten dengan penelitian Wicaksono & Yuliana (2019) yang menunjukkan bahwa kurangnya transparansi sering memicu ketidakpercayaan dan protes di kalangan mahasiswa.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1.4	1.4	1.4
Tidak Setuju	3	4.2	4.2	5.6
Setuju	34	47.2	47.2	52.8
Sangat Setuju	34	47.2	47.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 8 Efisiensi anggaran harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap IPM

Mayoritas responden menunjukkan kesadaran kritis terhadap pentingnya dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan jangka panjang. Sebanyak 47,2% responden menyatakan *setuju* dan 47,2% lainnya *sangat setuju* bahwa efisiensi anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas manusia, sebagaimana tercermin dalam IPM. Sementara itu, hanya 4,2% yang *tidak setuju* dan 1,4% *sangat tidak setuju*.

Temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa memandang kebijakan efisiensi tidak bisa sekadar berbasis pada penghematan jangka pendek, melainkan harus mempertimbangkan kontribusinya terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat — tiga pilar utama dalam IPM. Dukungan terhadap pandangan ini diperkuat oleh penelitian Arifin (2020) yang menekankan pentingnya investasi pendidikan sebagai fondasi peningkatan IPM di Indonesia.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0
Tidak Setuju	5	6.9	6.9	6.9
Setuju	30	41.7	41.7	48.6

Sangat Setuju	37	51.4	51.4	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 9 Pemangkasan anggaran membatasi akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu

Mayoritas responden menilai bahwa efisiensi atau pemangkasan anggaran berisiko mempersempit akses pendidikan bagi kelompok ekonomi lemah. Sebanyak 51,4% responden *sangat setuju* dan 41,7% *setuju* dengan pernyataan tersebut, sehingga total 93,1% menyatakan persetujuan. Hanya 6,9% responden yang *tidak setuju*, dan tidak ada yang menyatakan *sangat tidak setuju*.

Data ini mengindikasikan bahwa mahasiswa menyadari besarnya peran kebijakan anggaran dalam menjamin keberlanjutan studi bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi terbatas. Ketika dana beasiswa, subsidi, atau program bantuan pendidikan dikurangi, mahasiswa dari keluarga tidak mampu menjadi pihak yang paling terdampak. Temuan ini sejalan dengan studi Suryadi dan Wulandari (2021) yang menyebut bahwa pemangkasan anggaran pendidikan berimplikasi langsung pada penurunan jumlah beasiswa dan bantuan UKT.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0
Tidak Setuju	3	4.2	4.2	4.2
Setuju	30	41.7	41.7	45.8
Sangat Setuju	39	54.2	54.2	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 10 Efisiensi anggaran berisiko menaikkan UKT dan mengancam kelangsungan studi

Mayoritas responden menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak negatif efisiensi anggaran terhadap biaya kuliah. Sebanyak 54,2% responden *sangat setuju* dan 41,7% *setuju* bahwa efisiensi anggaran dapat menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mengancam kelangsungan studi mahasiswa. Hanya 4,2% yang *tidak setuju*, dan tidak ada responden yang menyatakan *sangat tidak setuju*.

Data ini mengindikasikan kekhawatiran luas bahwa kebijakan penghematan di sektor pendidikan tinggi dapat dilimpahkan kepada mahasiswa melalui kenaikan biaya pendidikan. Mahasiswa memandang bahwa tanpa perlindungan kebijakan yang berpihak,

efisiensi anggaran justru akan memperburuk akses dan keberlangsungan pendidikan tinggi. Temuan ini didukung oleh studi Purnamasari & Hidayat (2021) yang mencatat bahwa pemotongan anggaran operasional sering kali berujung pada peningkatan beban biaya kepada mahasiswa.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0
Tidak Setuju	7	9.7	9.7	9.7
Setuju	38	52.8	52.8	62.5
Sangat Setuju	27	37.5	37.5	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 11 Pemotongan tunjangan dosen non-PNS dapat menurunkan kualitas pengajaran

Mayoritas responden menunjukkan kekhawatiran terhadap dampak pemangkasan tunjangan dosen non-aparatur sipil negara (non-PNS). Sebanyak 52,8% responden *setuju* dan 37,5% *sangat setuju* bahwa kebijakan tersebut dapat berimplikasi negatif pada kualitas pengajaran di perguruan tinggi. Hanya 9,7% responden yang *tidak setuju*, dan tidak ada yang *sangat tidak setuju*.

Temuan ini mencerminkan persepsi luas bahwa insentif finansial memainkan peran penting dalam menjaga motivasi, profesionalisme, dan stabilitas tenaga pengajar non-PNS. Ketika tunjangan dipangkas, dosen mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang berdampak pada kinerja dan dedikasi dalam proses pembelajaran. Penelitian Sulistyowati & Pramono (2021) menegaskan bahwa ketidakpastian pendapatan dosen non-PNS memengaruhi kualitas interaksi akademik dan inovasi pengajaran.

Respon	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0
Tidak Setuju	3	4.2	4.2	4.2
Setuju	34	47.2	47.2	51.4
Sangat Setuju	35	48.6	48.6	100.0
Total	72	100.0	100.0	

Tabel 12 Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif untuk menjaga kualitas pendidikan

Dapat dilihat bahwa sebagian besar responden mendukung gagasan diversifikasi sumber pendanaan pendidikan. Sebanyak 48,6% responden *sangat setuju* dan 47,2% *setuju*, menunjukkan bahwa total 95,8% responden berpandangan bahwa ketergantungan penuh pada anggaran negara tidak lagi mencukupi untuk menjamin mutu pendidikan tinggi. Hanya 4,2% yang *tidak setuju*, dan tidak ada responden yang *sangat tidak setuju*.

Tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya keberlanjutan pendanaan pendidikan, terutama dalam konteks efisiensi anggaran pemerintah. Alternatif pendanaan seperti kerja sama industri, dana abadi pendidikan, kemitraan publik-swasta (PPP), serta optimalisasi filantropi pendidikan menjadi pilihan strategis yang dinilai perlu dikembangkan. Dukungan terhadap narasi ini juga diperkuat oleh World Bank (2020) yang menekankan perlunya *education financing reform* melalui pendanaan campuran guna meningkatkan efektivitas dan ketahanan sistem pendidikan tinggi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap persepsi mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2024, Universitas Tidar terkait kebijakan efisiensi anggaran pendidikan, bisa disimpulkan bahwa kebijakan tersebut belum dianggap sebagai strategi yang bermanfaat dan berdampak positif secara merata dikalangan mahasiswa. Mayoritas responden yang menjawab mengatakan bahwa efisiensi anggaran membawa konsekuensi negatif yang signifikan, termasuk penurunan produktivitas akademik, penurunan fasilitas pendidikan dan beasiswa, gangguan dalam operasional organisasi mahasiswa, dan ketimpangan dalam penyebaran bantuan pendidikan. Jawaban dari responden ini menunjukkan bahwa pendekatan efisiensi lebih menekankan pemangkasan daripada optimalisasi tata kelola anggaran atau inovasi kebijakan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sangat menyadari risiko jangka panjang dari kebijakan efisiensi yang tidak seimbang. Risiko-risiko ini termasuk meningkatnya biaya pendidikan, penurunan kualitas pengajaran karena penurunan tunjangan dosen, dan penurunan akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mahasiswa menegaskan kebutuhan akan transparansi anggaran dalam hal ini dan menuntut agar pemerintah serta lembaga pendidikan mencari sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan.

Namun, mahasiswa tidak langsung serta-merta menolak prinsip efisiensi. Sebaliknya, mereka menekankan betapa pentingnya efisiensi yang adil, akuntabel, dan berbasis prioritas substansial. Efisiensi harus difokuskan pada sektor administratif yang membebani anggaran tetapi tidak berkontribusi langsung pada kualitas pendidikan. Program pendidikan, beasiswa, atau kegiatan mahasiswa tidak boleh menjadi fokus efisiensi. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya tanggung jawab publik atas pengelolaan anggaran pendidikan juga merupakan alasan untuk tuntutan transparansi anggaran. Dengan hal itu, sebagai alternatif untuk menjaga keberlanjutan pendidikan di tengah keterbatasan anggaran negara, siswa mendorong diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan industri, filantropi pendidikan, dan kemitraan publik-swasta.

Hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa terkait kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dapat ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan konkret. Pertama, strategi efisiensi anggaran perguruan tinggi, terutama di Universitas Tidar, harus dievaluasi kembali. Sektor-sektor penting seperti beasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan tunjangan dosen tidak seharusnya menjadi fokus efisiensi. Sebaliknya, efisiensi seharusnya difokuskan pada pos anggaran yang tidak berdampak langsung pada kualitas pendidikan, seperti biaya administratif, yang masih dapat dikurangi dengan digitalisasi dan penyederhanaan birokrasi.

Kedua, sangat penting bagi lembaga pendidikan tinggi untuk membangun sistem pengelolaan anggaran yang lebih terbuka dan memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam prosesnya. Seperti forum anggaran terbuka, audit sosial, dan partisipasi mahasiswa dalam badan anggaran kampus adalah cara terbaik untuk melibatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kampus dan menumbuhkan budaya kontrol sosial dan akuntabilitas di antara *civitas akademika*.

Ketiga, universitas harus segera memikirkan cara lain untuk mengembangkan sumber-sumber dana. Termasuk bekerja sama dengan industri secara strategis, membuat program filantropi pendidikan yang bertahan lama, mengelola dana abadi, dan mengoptimalkan bisnis kampus. Reformasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kolaborasi multi-pihak akan memperkuat kemandirian fiskal kampus dan memungkinkan

inovasi dan pengembangan program pendidikan yang lebih sesuai dengan perubahan zaman.

Secara lebih luas, temuan penelitian ini juga memberi sinyal kepada pembuat kebijakan, baik di tingkat institusi maupun pemerintah pusat, bahwa pertimbangan tentang konteks sosial dan ekonomi mahasiswa diperlukan saat membuat dan menerapkan kebijakan yang efektif. Kebijakan harus memungkinkan akses pendidikan yang berkelanjutan, terutama bagi kelompok rentan, dan meningkatkan pendidikan secara merata. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran Pendidikan yang hanya berfokus pada angka penghematan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan akademis dapat melemahkan fungsi reformatif pendidikan itu sendiri.

Disarankan agar penelitian serupa dilakukan di masa mendatang dengan cakupan populasi yang lebih luas dan lintas perguruan tinggi untuk menangkap keragaman persepsi mahasiswa di seluruh negeri. Pendekatan campuran (*mixed methods*) juga dapat dipertimbangkan agar temuan tidak hanya bersifat deskriptif kuantitatif, tetapi juga memberikan ruang bagi suara dan pengalaman subjektif mahasiswa secara mendalam. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang akan datang dapat dibuat berdasarkan bukti yang lebih komprehensif.

Referensi

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan* <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/906>
- Giantara, F., & Amiliya, R. (2021). Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam sebagai bagian dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu* <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/view/15773>
- Ilma, Ajeng, Prabandari, A. (2025). *Efisiensi vs. Kualitas: Evaluasi Kebijakan Anggaran Pendidikan dalam Pemerintahan Prabowo*. 4(1), 1–9.
- King, K. (2012). Framing the World Bank Education Strategy 2020 to the Indian Context. *International Perspectives on Education and Society*, 16, 371–393. [https://doi.org/10.1108/S1479-3679\(2012\)0000016020](https://doi.org/10.1108/S1479-3679(2012)0000016020)
- Kurnia, R., Putra, R. Y., & Syukria, A. (2022). *Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada fakultas ekonomi dan bisnis islam uin imam bonjol padang*. 7(2), 77–88.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaa Kebijakan dalam Publik. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Sugiyono, D. (2019). *Statistika untuk Penelitian (Cetakan ke-30)*. Bandung: Cv Alfabeta.

Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*.